



**komisi
pemilihan
umum**
KABUPATEN
SORONG SELATAN

Bersama
Membangun
Harapan Baru

27
November
2024



Semester 7s

Catatan atas Laporan Keuangan

TAHUN ANGGARAN 2024

UNTUK PERIODE BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



kab-sorongselatan.kpu.go.id



kpu sorsel



kpu_sorsel



@KPU Sorsel_ID



KPU SORSEL

KPU KABUPATEN SORONG SELATAN

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

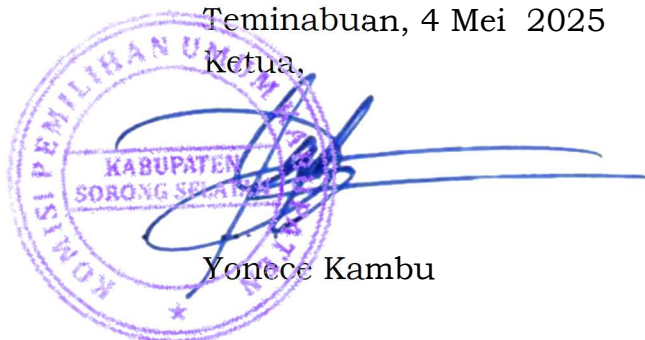
KPU Kabupaten Sorong Selatan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan KPU Kabupaten Sorong Selatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPU Kabupaten Sorong Selatan. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Teminabuan, 4 Mei 2025

Ketua,

The image shows a circular official stamp of the KPU Kabupaten Sorong Selatan. The stamp contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN" around the perimeter and a star at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Yonece Kambu

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	5
Daftar Isi	6
Pernyataan Tanggung Jawab	7
Ringkasan	
I. Laporan Realisasi Anggaran	8
II. Neraca	11
III. Laporan Operasional	13
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	15
V. Catatan atas Laporan Keuangan	17
A. Penjelasan Umum	17
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	22
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	26
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	34
F. Pengungkapan Penting Lainnya	51
VI. Lampiran dan Daftar	52

KPU KABUPATEN SORONG SELATAN

Jl. Teminabuan Ayamuru, Distrik Teminabuan

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja KPU Kabupaten Sorong Selatan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Teminabuan, 4 Mei 2025
Plt. Sekretaris

The image shows a circular official stamp of the KPU Kabupaten Sorong Selatan. The outer ring of the stamp contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN". The inner part of the stamp has the word "SEKRETARIAT" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Fredrik Kalilago, SH
NIP 19790215 201405 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Satuan Kerja KPU Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp21.470.500 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp62.734.265.070 atau mencapai 93,90 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp66.808.340.000.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp8.243.484.977 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp4.024.999.916; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp4.218.485.061; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp8.243.484.977.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp63.350.833.944 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp63.350.833.944. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp73.775.562 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp63.424.609.506.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp6.773.024.059 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp63.424.609.506 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp64.895.070.424 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp8.243.484.977.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah

penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KPU KABUPATEN SORONG SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	Th 2024				Th 2023
		Anggaran	Realisasi	Realisasi Diatas (Dibawah)	%	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	B.1					
Penerimaan Perpajakan	B.2	0	0	0	0,00	0
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.3	0	21.470.500	21.470.500	0,00	23.722.100
Penerimaan Hibah	B.4	0	0	0	0,00	0
Jumlah Pendapatan dan Hibah		0	21.470.500	21.470.500	0,00	23.722.100
Belanja	B.5					
Belanja Pegawai	B.6	2.472.847.000	2.463.490.582	(9.356.418)	8,44	2.271.666.814
Belanja Barang	B.7	63.901.493.000	59.940.101.888	(3.961.391.112)	162,72	22.826.767.956
Belanja Modal	B.8	434.000.000	330.672.600	(103.327.400)	525,38	52.875.100
Belanja Bantuan Sosial	B.9	0	0	0	0,00	0
Jumlah Belanja		66.808.340.000	62.734.265.070	(4.074.074.930)	93,90	25.151.309.870

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KPU KABUPATEN SORONG SELATAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	3.925.999.916	2.032.510.764
Piutang Perpajakan	C.1.4	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.1.5	0	0
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.6	0	0
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.7	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	C.1.8	0	0
Beban Dibayar di Muka	C.1.9	99.000.000	231.000.000
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.10	0	0
Persediaan	C.1.11	0	284.709.508
JUMLAH ASET LANCAR		4.024.999.916	2.548.220.272
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	1.065.150.000	1.065.150.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	2.466.437.456	2.135.764.856
Gedung dan Bangunan	C.2.3	3.104.366.899	3.104.366.899
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	0	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(2.417.469.294)	(2.047.937.204)
JUMLAH ASET TETAP		4.218.485.061	4.257.344.551
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3		
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1	0	0
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.3.2	0	0
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.3.3	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	C.3.4	0	0
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		0	0
ASET LAINNYA	C.4		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	C.4.1	0	0
Aset Tak Berwujud	C.4.2	0	0
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	C.4.3	0	0
Aset Lain-lain	C.4.4	24.000.000	24.000.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.5	(24.000.000)	(24.000.000)
JUMLAH ASET LAINNYA		0	0
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5		
Uang Muka dari KPPN	C.5.1	0	0
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.2	0	32.540.764
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.3	0	0
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.5.4	0	0
Utang yang Belum Ditagihkan	C.5.5	0	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.5.6	0	0

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		0	32.540.764
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	C.6		
Kewajiban Konsesi Jasa	C.6.1	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0	0
JUMLAH KEWAJIBAN		0	32.540.764
EKUITAS			
Ekuitas	C.7	8.243.484.977	6.773.024.059
JUMLAH EKUITAS		8.243.484.977	6.773.024.059
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		8.243.484.977	6.805.564.823

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KPU KABUPATEN SORONG SELATAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	0	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2	0	0
Pendapatan Hibah	D.3	0	0
JUMLAH PENDAPATAN		0	0
BEBAN			
Beban Pegawai	D.4	2.463.490.582	2.271.666.814
Beban Persediaan	D.5	626.317.016	0
Beban Barang dan Jasa	D.6	52.797.580.885	20.306.122.156
Beban Pemeliharaan	D.7	280.556.745	157.630.926
Beban Perjalanan Dinas	D.8	6.813.356.626	1.994.963.391
Beban Barang untuk Diserahkan ke Masyarakat	D.9	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.10	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.11	369.532.090	320.858.235
Beban Penyusutan Piutang Tak Tertagih	D.12	0	0
JUMLAH BEBAN		63.350.833.944	25.051.241.522
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(63.350.833.944)	(25.051.241.522)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(73.775.562)	7.987.100
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		21.470.500	7.987.100
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		95.246.062	0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11	(73.775.562)	23.152.100
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(63.424.609.506)	(25.028.089.422)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan Luar Biasa		0	0
Beban Luar Biasa		0	0
JUMLAH POS LUAR BIASA		0	0

SURPLUS (DEFISIT) LO		(63.424.609.506)	(25.028.089.42 2)
----------------------	--	----------------------	----------------------

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KPU KABUPATEN SORONG SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	6.773.024.059	4.525.897.686
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(63.424.609.506)	(25.028.089.422)
DAMPAK AKUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			9
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	E.4.3	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.4	0	0
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	64.895.070.424	27.275.215.795
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		1.470.460.918	2.247.126.373
EKUITAS AKHIR	E.6	8.243.484.977	6.773.024.059

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Satuan Kerja KPU Kabupaten Sorong Selatan

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis*

Satuan Kerja KPU Kabupaten Sorong Selatan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan pemilihan umum. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Satuan Kerja KPU Kabupaten Sorong Selatan mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Satuan Kerja KPU Kabupaten Sorong Selatan berkomitmen dengan misi **"mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan. Melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang berkualitas."** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
2. Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan,
3. Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya,
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satuan Kerja KPU Kabupaten Sorong Selatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Satuan Kerja KPU Kabupaten Sorong Selatan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi

dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satuan Kerja KPU Kabupaten Sorong Selatan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari KPU Kabupaten Sorong Selatan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja KPU Kabupaten Sorong Selatan adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan

tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
- c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset LAINLAIN pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa,	20 tahun

Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset LAINLAIN berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penjelasan atas
Pos Laporan
Realisasi
Anggaran

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja KPU Kabupaten Sorong Selatan memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp18.705.155.000. Selama tahun 2024, dilakukan revisi atas DIPA Awal Satuan Kerja KPU Kabupaten Sorong Selatan yang disebabkan adanya *Refocussing*, penghematan belanja pemerintah serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Tahun Anggaran 2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Perpajakan	0	0
Pendapatan PNB	0	0
Pendapatan Hibah	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	2.250.468.000	2.472.847.000
Belanja Barang	16.454.687.000	63.901.493.000
Belanja Modal	0	434.000.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	18.705.155.000	66.808.340.000

B.1 Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp21.470.500

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp21.470.500 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Satuan Kerja KPU Kabupaten Sorong Selatan terdiri dari Setoran belanja atas temuan APIP pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2020:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan (dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024		%
	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan Perpajakan	0	0	0,00
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	21.470.500	0,00
Pendapatan Hibah	0	0	0,00
Jumlah	0	21.470.500	0,00

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Pendapatan Perpajakan	0	0	0,00
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	21.470.500	23.722.100	(9,49)
Pendapatan Hibah	0	0	0,00
Jumlah	21.470.500	23.722.100	(9,49)

B.2 Pendapatan Perpajakan

Pendapatan
Perpajakan Rp0

Realisasi Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Perpajakan
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Jumlah Pendapatan Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Pendapatan Perpajakan	0	0	0,00
Jumlah Pendapatan	0	0	0,00

B.3 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pendapatan PNB
Rp21.470.500

Realisasi Pendapatan PNB untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp21.470.500 dan Rp23.722.100.

Perbandingan Realisasi Pendapatan PNB
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	0	15.735.000	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	21.470.500	7.987.100	168,81
Jumlah Pendapatan Kotor	21.470.500	23.722.100	(9,49)
Pengembalian Pendapatan PNBPN	0	0	0,00
Jumlah Pendapatan	21.470.500	23.722.100	(9,49)

Pendapatan Hibah Rp0

B.4 Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Hibah
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Jumlah Pendapatan Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Pendapatan Hibah	0	0	0,00
Jumlah Pendapatan	0	0	0,00

Realisasi Belanja Rp62.734.265.070

B.5 Belanja

Realisasi Belanja Kantor Akuntansi pada TA 2024 adalah sebesar Rp62.734.265.070 atau 91,81% dari anggaran belanja sebesar Rp66.808.340.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.472.847.000	2.463.490.582	99,62
Belanja Barang	63.901.493.000	59.970.970.652	93,85
Belanja Modal	434.000.000	330.672.600	76,19
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00

Total Belanja Kotor	66.808.340.000	62.765.133.834	93,95
Pengembalian Belanja Pegawai	-	0	-
Pengembalian Belanja Barang	-	30.868.764	-
Pengembalian Belanja Modal	-	0	-
Pengembalian Belanja Bantuan Sosial	-	0	-
Jumlah	66.808.340.000	62.734.265.070	93,90

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 149,43 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Meningkatnya Belanja dikarenakan adanya kegiatan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Pegawai	2.463.490.582	2.271.666.814	8,44
Belanja Barang	59.940.101.888	22.826.767.956	162,72
Belanja Modal	330.672.600	52.875.100	525,38
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Jumlah	62.734.265.070	25.151.309.870	149,43

B.6 Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
Rp2.463.490.582*

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.463.490.582 dan Rp2.271.666.814. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 8,44 persen dari TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penerimaan pegawai Non PNS (PPPK) dalam rangka mendukung program dan kegiatan kantor.

2. Adanya penambahan jumlah pegawai jabatan structural PNS .

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	821.156.833	850.836.008	(3,49)
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	0	812.730.500	(100,00)
Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	1.519.678.941	608.100.306	149,91
Jumlah Belanja Kotor	2.463.490.582	2.271.666.814	8,44
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	0,00
Jumlah Belanja	2.463.490.582	2.271.666.814	8,44

Belanja Barang
Rp59.940.101.888

B.7 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp59.940.101.888 dan Rp22.826.767.956. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan 162,72% dari Realisasi Belanja Barang TA 2023. Hal ini disebabkan, antara lain:

1. Peningkatan belanja pemeliharaan untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama,
2. Peningkatan Belanja Jasa langganan listrik dan air yang disebabkan meningkatnya aktivitas pelayanan,
3. Peningkatan Belanja baran dan Perjalanan dinas dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Barang Operasional	342.533.738	259.663.633	31,91
Belanja Barang Non Operasional	46.036.249.881	19.820.618.513	132,26
Belanja Persediaan	180.607.632	137.051.483	31,78
Belanja Jasa	6.317.666.030	411.480.010	1435,35
Belanja Pemeliharaan	280.556.745	157.630.926	77,98

Belanja Perjalanan Dinas	6.813.356.626	2.040.457.645	233,91
Jumlah Belanja Kotor	59.970.970.652	22.826.902.210	162,59
Pengembalian Belanja Barang	(30.868.764)	(134.254)	22892,81
Jumlah Belanja	59.940.101.888	22.826.767.956	162,72

B.8 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp330.672.600

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp330.672.600 dan Rp52.875.100. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 525,38% dibandingkan TA 2023 disebabkan oleh rencana peningkatan kapasitas kerja Satker KPU Sorong Selatan dalam rangka menghadapi Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	330.672.600	52.875.100	525,38
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	330.672.600	52.875.100	525,38
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	330.672.600	52.875.100	525,38

B.8.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal
Tanah Rp0

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibandingkan TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Tanah
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	0	0	0,00

B.8.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp330.672.600 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 adalah sebesar Rp330.672.600, mengalami kenaikan sebesar 525,38 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp52.875.100. oleh rencana peningkatan kapasitas kerja Satker KPU Sorong Selatan dalam rangka menghadapi Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024

Perbandingan Realiasi Belanja Peralatan dan Mesin

TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	330.672.600	52.875.100	525,38
Jumlah Belanja Kotor	330.672.600	52.875.100	525,38
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	330.672.600	52.875.100	525,38

B.8.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0 Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibandingkan Realisasi TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00

Jumlah Belanja Modal	0	0	0,00
----------------------	---	---	------

B.8.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibandingkan Realisasi TA 2023

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	0	0	0,00

B.8.5 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya Rp0

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibandingkan TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	0	0	0,00

B.9 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Rp0

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibandingkan TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
--------	----------------	----------------	---

Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar

Rp4.024.999.916

Jumlah Aset Lancar KPU Kabupaten Sorong Selatan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp4.024.999.916 dan Rp2.548.220.272.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara

Pengeluaran

Rp0

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada KPU Kabupaten Sorong Selatan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Uang Tunai	0	0
Bank BRI No. Rek.	0	0
Jumlah	0	0

Kas di Bendahara

Penerimaan

Rp0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel 2
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Uang Tunai	0	0
Bank Mandiri No. Rek. 1030001123322	0	0
Jumlah	0	0

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp3.925.999.916*

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp3.925.999.916 dan Rp2.032.510.764.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	32.540.764
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	3.925.999.916	1.999.970.000
Kas Lainnya di K/L Dana Kelolaan LPP RRI/TVRI	0	0
Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi	0	0
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	0	0
Jumlah	3.925.999.916	2.032.510.764

*Piutang Perpajakan
Rp0*

C.1.4. Piutang Perpajakan

Piutang Perpajakan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4
Rincian Piutang Perpajakan TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran

atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Piutang Bukan Pajak
Rp0

C.1.5. Piutang Bukan Pajak
Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Piutang PNB	0	0
Piutang Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)
Rp0

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6
Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023

Bagian Lancar
Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp0

C.1.7. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam

waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut:

Tabel 7
Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Jk. Pendek
Rp0*

C.1.8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih KPU Kabupaten Sorong Selatan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Pendek
(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar		0,5%	
Kurang Lancar		10%	
Diragukan		50%	
Macet		100%	
Jumlah	0		0
Piutang Bukan Pajak			
Lancar		0,5%	
Kurang Lancar		10%	
Diragukan		50%	
Macet		100%	
Jumlah	0		0
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar		0,5%	
Kurang Lancar		10%	
Diragukan		50%	
Macet		100%	
Jumlah	0		0
Bagian Lancar TPA			

Lancar		0,5%	
Kurang Lancar		10%	
Diragukan		50%	
Macet		100%	
Jumlah	0		0
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0		0

Beban Dibayar di Muka
Rp99.000.000

C.1.9. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp99.000.000 dan Rp231.000.000.

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka KPU Kabupaten Sorong Selatan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 9

Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Sewa Gudang Logistik	99.000.000	231.000.000
Jumlah	99.000.000	231.000.000

Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Rp0

C.1.10. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima KPU Kabupaten Sorong Selatan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima

TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Jasa Pelatihan		
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan		
Jumlah	0	0

Persediaan
Rp0

C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp284.709.508 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11
Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2024	Tahun 2023
Barang Konsumsi	0	0
Amunisi	0	0
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0
Persediaan Lainnya	0	0
Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0	0
Jumlah	0	284.709.508

Aset Tetap
Rp4.218.485.061

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap KPU Kabupaten Sorong Selatan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp4.218.485.061 dan Rp4.257.344.551.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada KPU Kabupaten Sorong Selatan berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah
Rp1.065.150.000

C.2.1. Tanah
Tanah yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.065.150.000 dan Rp1.065.150.000. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Rincian Mutasi Tanah
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	1.065.150.000
Pembelian	0
Revaluasi Aset	0
Penghapusan	0
Saldo Per 31 Desember 2024	1.065.150.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	1.065.150.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Rincian Tanah TA 2024
(dalam rupiah)

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	14.000 m ²	Jl. Teminabuan Ayamaru	1.065.150.000
Jumlah			1.065.150.000

Peralatan dan Mesin
Rp2.466.437.456

C.2.2. Peralatan dan Mesin
Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin KPU Kabupaten Sorong Selatan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2.466.437.456 dan Rp2.135.764.856. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	2.135.764.856
Pembelian	
Hibah	
Transfer Masuk	
Koreksi Tambah	
Penghentian aset dari penggunaan	

Gedung dan Bangunan
Rp3.104.366.899

Saldo Per 31 Desember 2024	2.466.437.456
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(1.931.533.444)
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	534.904.012

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp3.104.366.899 dan Rp3.104.366.899.
Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2024
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	3.104.366.899
Pembangunan Gedung	0
Mutasi Kurang:	-
Saldo Per 31 Desember 2024	3.104.366.899
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(485.935.850)
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	2.618.431.049

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp0

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	0
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	0
Koreksi Pencatatan	-
Saldo Per 31 Desember 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	0

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Tetap Lainnya
Rp0

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	0
-	-
-	-
Saldo Per 31 Desember 2022	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	0

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 .

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp2.417.469.294

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.417.469.294 dan Rp2.047.937.204. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024.

Tabel 18
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	2.466.437.456	(1.931.533.444)	534.904.012
2.	Gedung dan Bangunan	3.104.366.899	(485.935.850)	2.618.431.049
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0

4.	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
----	--------------------	---	---	---

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Piutang Jangka Panjang
Rp0*

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang KPU Kabupaten Sorong Selatan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Piutang Tagihan Tuntutan

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Rp0*

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) KPU Kabupaten Sorong Selatan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, berupa penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

Piutang Jangka Panjang Lainnya Rp0

C.3.3. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp0

C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang KPU Kabupaten Sorong Selatan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

(TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Aset Lainnya

Rp0

C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya KPU Kabupaten Sorong Selatan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada KPU Kabupaten Sorong Selatan terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset LAINLAIN.

Kemitraan dengan

Pihak Ketiga

Rp0

C.4.1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Nilai perolehan Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud

Rp0

C.4.2. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Dana yang Dibatasi

Penggunaannya Rp0

C.4.3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Dana yang Dibatasi Penggunaannya berupa Dana yang tersimpan di Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang belum dilakukan pembayaran hingga 31 Desember 2024. Rincian sisa pembayaran yang belum dilakukan pembayaran hingga 31 Desember 2024 .

Aset Lain-Lain

Rp24.000.000

C.4.4. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp24.000.000 dan Rp24.000.000. Aset LAIN LAIN berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional KPU Kabupaten Sorong Selatan.

Adapun mutasi Aset LAINLAIN adalah sebagai berikut:

Tabel 19

Rincian Mutasi Aset Lain-Lain

(dalam rupiah)

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp24.000.000

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	24.000.000
Reklasifikasi dari Aset Tetap	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	
Penghapusan BMN	
Saldo Per 31 Desember 2024	24.000.000
Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	(24.000.000)
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	0

Transaksi penambahan dan pengurangan aset LAINLAIN dapat dijelaskan sebagai berikut:

C.4.5. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp24.000.000 dan Rp24.000.000. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya TA 2024

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
	Jumlah	0	0	0
B.	Aset LAINLAIN			
4.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	24.000.000	24.000.000	0
	Jumlah	24.000.000	24.000.000	0
	Total	24.000.000	24.000.000	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kewajiban Jangka
Pendek Rp 0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek KPU Kabupaten Sorong Selatan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp32.540.764.

*Uang Muka dari
KPPN Rp0*

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada Pihak
Ketiga Rp0*

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp32.540.764. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

*Pendapatan Diterima
di Muka Rp0*

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN.

*Beban yang Masih
Harus Dibayar Rp0*

C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya,

*Utang yang Belum
Ditagihkan Rp0*

C.5.5. Utang yang Belum Ditagihkan

Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp0*

C.5.6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Kewajiban Jangka Panjang Rp 0

C.6. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Panjang KPU Kabupaten Sorong Selatan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Kewajiban Konsesi Jasa Rp0

C.6.1. Kewajiban Konsesi Jasa

Kewajiban Konsesi Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban yang timbul dari dampak pengakuan aset konsesi jasa yang berasal dari mitra (badan usaha) sesuai dengan perjanjian konsesi jasa antara entitas pemerintah pusat dengan mitra (badan usaha).

Ekuitas Rp8.243.484.977

C.7. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp8.243.484.977 dan Rp6.773.024.059. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan
Perpajakan
Rp0*

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Perpajakan
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Jumlah	0	0	0,00

*Pendapatan
PNBP Rp0*

D.2 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Jumlah	0	0	0,00

*Pendapatan
Hibah Rp0*

D.3 Pendapatan Hibah

Jumlah Pendapatan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Hibah
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Jumlah	0	0	0,00

*Beban
Pegawai
Rp2.463.490.582*

D.4 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.463.490.582 dan Rp2.271.666.814. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang

dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	821.156.833	850.836.008	(3,49)
Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	0	812.730.500	(100,00)
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	122.654.808	0	0,00
Beban Tunjangan Khusus & Beban Pegawai Transito	1.519.678.941	608.100.306	149,91
Jumlah Beban	2.463.490.582	2.271.666.814	8,44

D.5 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp626.317.016 dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Persediaan Bahan Baku	626.317.016	0	0,00
Jumlah Beban	626.317.016	0	0,00

D.6 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp52.797.580.885 dan Rp20.306.122.156.

Beban Persediaan
Rp626.317.016

Beban Barang dan Jasa
Rp52.797.580.885

Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Keperluan Perkantoran	0	89.298.633	(100,00)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	127.033.738	110.581.000	14,88
Beban Barang Operasional Lainnya	215.500.000	57.984.000	271,65
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1.800.000	(100,00)
Beban Bahan	3.495.982.332	564.509.353	519,30
Beban Honor Output Kegiatan	14.372.291.236	12.801.900.000	12,27
Beban Barang Non Operasional Lainnya	28.137.107.549	6.499.569.160	332,91
Beban Langganan Listrik	25.017.500	61.044.250	(59,02)
Beban Sewa	181.000.000	39.660.000	356,38
Beban Jasa Profesi	36.400.000	0	0,00
Beban Jasa Lainnya	6.207.248.530	79.775.760	7680,87
Jumlah Beban	52.797.580.885	20.306.122.156	160,01

D.7 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
Rp280.556.745

5

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp280.556.745 dan Rp157.630.926. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	99.960.000	72.061.600	38,71

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp6.813.356.6
26

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	180.596.745	85.569.326	111,05
Jumlah Beban	280.556.745	157.630.926	77,98

D.8 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.813.356.626 dan Rp1.994.963.391. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun dan adanya pelatihan dari Kantor Pusat yang perjalanan dinasnya ditanggung sendiri. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	4.454.617.626	1.282.730.355	247,28
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.589.579.000	653.665.000	143,18
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	754.610.000	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	14.550.000	58.568.036	(75,16)
Jumlah Beban	6.813.356.626	1.994.963.391	241,53

Beban Barang
untuk
Diserahkan
Kepada
Masyarakat Rp0

D.9 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Satker memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat dan pengusaha UMKM berupa bantuan peralatan dan perlengkapan untuk penerapan akuntansi dan pelaporan. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Beban Bantuan Sosial Rp0

Uraian	2024	2023	%
Jumlah Beban	0	0	0,00

D.10 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Peningkatan beban bansos yang diberikan kepada kelompok masyarakat sebagai Bantuan Sosial untuk mendukung program Indonesia Pintar. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Jumlah Beban	0	0	0,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp369.532.090

D.11 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp369.532.090 dan Rp320.858.235. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	299.707.262	249.268.407	20,23
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	69.824.828	69.824.828	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	1.765.000	(100,00)

Jumlah Penyusutan	369.532.090	320.858.235	15,17
Jumlah Amortisasi	0	0	0,00
Jumlah Beban	369.532.090	320.858.235	15,17

Beban
Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih Rp0

D.12 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Kegiatan Non
Operasional
Rp73.775.562

D.13 Kegiatan Non Operasional

Pos Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	15.735.000	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	21.470.500	7.987.100	168,81
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	93.539.000	0	0,00
Beban Pelepasan Aset	0	570.000	(100,00)
Beban Persediaan Usang/Rusak	1.707.062	0	0,00
Jumlah Beban	(73.775.562)	23.152.100	(418,66)

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa
Nihil

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp6.773.024.059

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp6.773.024.059 dan Rp4.525.897.686.

Defisit LO
Rp63.424.609.506

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah defisit sebesar Rp63.424.609.506 dan Rp25.028.089.422. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi
Rp0

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Selisih Revaluasi Aset
Rp0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai
Aset Non
Revaluasi Rp0

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Koreksi
LAINLAIN Rp0

E.4.5. Koreksi LAINLAIN

Koreksi LAINLAIN untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang.

Transaksi Antar
Entitas
Rp64.895.070.4
24

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp64.895.070.424 dan Rp27.275.215.795.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 21
Transaksi Antar Entitas TA 2024

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	(21.470.500)
Ditagihkan ke Entitas Lain	27.796.834.986
Transfer Masuk	256.245.938
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	36.863.460.000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
Jumlah	64.895.070.424

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp21.470.500 sedangkan DKEL sebesar Rp27.796.834.986.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp256.245.938 terdiri dari:

Tabel 22

Transfer Masuk TA 2024

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Persediaan	KPU Provinsi Papua Barat Daya	256.245.938
Jumlah			256.245.938

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 23

Transfer Keluar TA 2024

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
Jumlah			0

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp36.863.460.000 dari total Rp36.863.460.000 yang diterima sepanjang tahun 2024 dan total Rp0 yang merupakan Hibah Langsung yang Belum Disahkan dari Tahun Anggaran Yang Lalu.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 24

Pengesahan Hibah Langsung TA 2024

No.	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1.	Pemda Kab. Sorong Selatan	Uang	36.863.460.000
Total Pengesahan			36.863.460.000
Pengesahan Pengembalian Hibah			0
Jumlah			36.863.460.000

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Per Satker Tahun 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Ekuitas Akhir
Rp8.243.484.97
7

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp8.243.484.977 dan Rp6.773.024.059.

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Pengungkapan LAINLAIN

1. Adanya koreksi nama item persediaan berupa logistic Pemilu Tahun 2024 sebesar Rp. 93.539.000
2. Berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sorong Selatan Tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 27 Tahun 2024 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penangguna Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Akuntansi Bogor pada tanggal 04 Agustus 2024 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan,

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Mohammad Rusdianto
Pejabat Pembuat Komitmen	: Fredrik Kalilago
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Mohammad Rusdianto
Bendahara Pengeluaran	: Arifuddin
Bendahara Pengeluaran Hibah	: Maskiswo AP

Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Fredrik Kalilago
Pejabat Pembuat Komitmen	: Fredrik Kalilago
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Arifuddin
Bendahara	: Erina Qurrota Aini
Bendahara Pengeluaran Hibah	: Maskiswo AP